



Puskesmas Ketungau Hilir Terbengkalai

SINTANG-Salah satu pembangunan puskesmas yang terletak di Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir untuk sementara dihentikan.

Menurut Bupati Sintang, Jarot Winarno ini adalah salah satu pembangunan yang dikerjakan pada tahun 2018 lalu dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI.

"Puncaknya tahun 2018 lalu, karena ada dana DAK yang kita kembalikan 75%, performance dari mereka pemborong hanya mampu mengelola 25% saja, kita hentikan proyeknya bangunan Puskesmas Ketungau Hilir, kita sadari, meskipun kita dirugikan, karena dana DAK itu dikembalikan, tapi yang penting negara tidak boleh dirugikan. Jadi sampai sekarang bangunannya agak terbengkalai, kemungkinan untuk kelanjutannya nanti akan menggunakan dana DAU," terang Jarot pada saat menerima penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI kemarin di Kantor Bupati Sintang.

Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan, dr Harysinto Linoh saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa puskesmas yang ada di Desa Nanga Ketungau itu merupakan relokasi dari puskesmas yang sudah ada. "Relokasi puskesmas yang ada sebelumnya dan mau kita bangun yang baru, dan saat ini kita masih pakai puskesmas yang lama. Dan saat ini proses pembangunan memang berhenti," ujar Kadinkes.

Menurutnya, penyebab dari diberhentikannya proses pembangunan puskesmas tersebut, karena terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor dengan nama PT. Bahana Krida Nusantara. Pihak kontraktor memang tidak bisa menyelesaikan proses pembangunan dan tenggang waktu yang sudah ditentukan yakni 180 hari kalender. "Terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor, kita



HUMAS PEMKAB FOR PONTIANAK POST

BELUM SELESAI: Kadinkes Sintang dan Bupati meninjau puskesmas yang belum selesai di Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir, belum lama ini.

sudah bekerja sama dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kita sudah lakukan berbagai tahapan termasuk peringatan, pemanggilan dan sebagainya, hingga kita putus kontrak dengan pihak kontraktor," tambahnya.

Harysinto juga memaparkan bahwa sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak kontraktor mendapat sanksi. "Sudah dilakukan audit juga oleh BPK, kontraktor juga mendapat sanksi dari wanprestasi dan kita blacklist. Kita sudah lalui pemanggilan, peringatan bersama-sama TP4D dan inspektorat," ucapnya.

Akibatnya, sisa dana kembali ke pusat dan menjadi beban pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan. "Kita sudah bahas di rapat, alasannya memang faktor cuaca dan mobilisasi bahan ke Ketungau Hilir," jelasnya.

Kedepannya, lanjut Harysinto, pemerintah daerah akan melanjutkan proses pembangunannya dengan kembali mengalokasikan anggaran pembangunan untuk puskesmas di Kecamatan Ketungau Hilir. "Upaya kedepan memang Pemda yang akan melanjutkan proses pembangunan. Inikan seharusnya selesai di dana DAK karena tak selesai, pemda yang

akan melanjutkan, nah rencananya akan kita alokasikan tahun depan, namun kita lihat dulu apakah bisa atau tidak," paparnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pembangunan relokasi puskesmas yang ada di Desa Nanga Ketungau ini, Rachmat Aseng menjelaskan bahwa total pagu pembangunannya sebesar Rp3.150.187.000 (Rp3,1 Miliar). "Proses realisasinya memang baru 25% pembangunannya dan sudah lama dihentikan. Dari Rp3,1 Miliar tersebut, baru terpakai uang mukanya sebesar Rp758.333.250 dan sisanya karena dana DAU dari Pemerintah Pusat tak bisa lagi digunakan karena wanprestasi dari pihak kontraktor," ungkap Rachmat Aseng.

Ia menjelaskan, pihaknya memang sudah melakukan pendampingan dalam proses pembangunan ini, memang dari pihak kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan dari tenggang waktu yang sudah ditentukan. "Kita juga sudah cek bersama BPK dan Inspektorat memang di lokasi dan uang muka yang diberi tidak ada masalah diproses pembangunan. Memang kendalanya adalah tidak sesuai tenggang waktu yang diberikan dan sementara pembangunan ini dihentikan," imbuhnya. (fids)